

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

DPR RI merupakan lembaga politik yang memiliki peran strategis dalam menyusun undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR RI memiliki supporting system, dalam hal ini Sekretaris Jenderal yang memberikan dukungan Kesekretariatan, Persidangan dan Keahlian. Biro Pemberitaan Parlemen menjalankan peran dukungan penyelenggaraan urusan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan. Dukungan penyelenggaraan pemberitaan, informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen dan penerbitan diberikan kepada DPR RI dalam kerangka standar pelayanan prima dan optimal.

#### **a. Kedudukan**

Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Biro Pemberitaan Parlemen berada di bawah Deputy Persidangan, yang mempunyai tugas pokok yaitu penyelenggaraan urusan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Pemberitaan Parlemen memiliki fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen;
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen;
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;

- g. penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website;
- h. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- i. penyelenggaraan televisi dan radio;
- j. penyelenggaraan urusan penerbitan;
- k. penyelenggaraan kehumasan;
- l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan
- n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Pemberitaan Parlemen didukung oleh 4 (empat) unit kerja sebagai berikut:

### **1. Bagian Media Cetak dan Media Sosial**

Mempunyai tugas mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website, serta melaksanakan analisis media. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial; pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;

Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Media Cetak;
- b. Subbagian Media Sosial dan Website; dan
- c. Subbagian Analisis Media.

### **2. Bagian Humas**

Mempunyai tugas melaksanakan penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik. Fungsi pelayanan informasi public dan pelaksanaan kehumasan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Penerangan; dan b. Subbagian Pelayanan Informasi Publik.

### **3. Bagian Penerbitan**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. Fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang penerbitan; pelaksanaan proses produksi; dan pelaksanaan distribusi produk terbitan.

Bagian Penerbitan terdiri atas:

- a. Subbagian Produksi; dan
- b. Subbagian Distribusi.

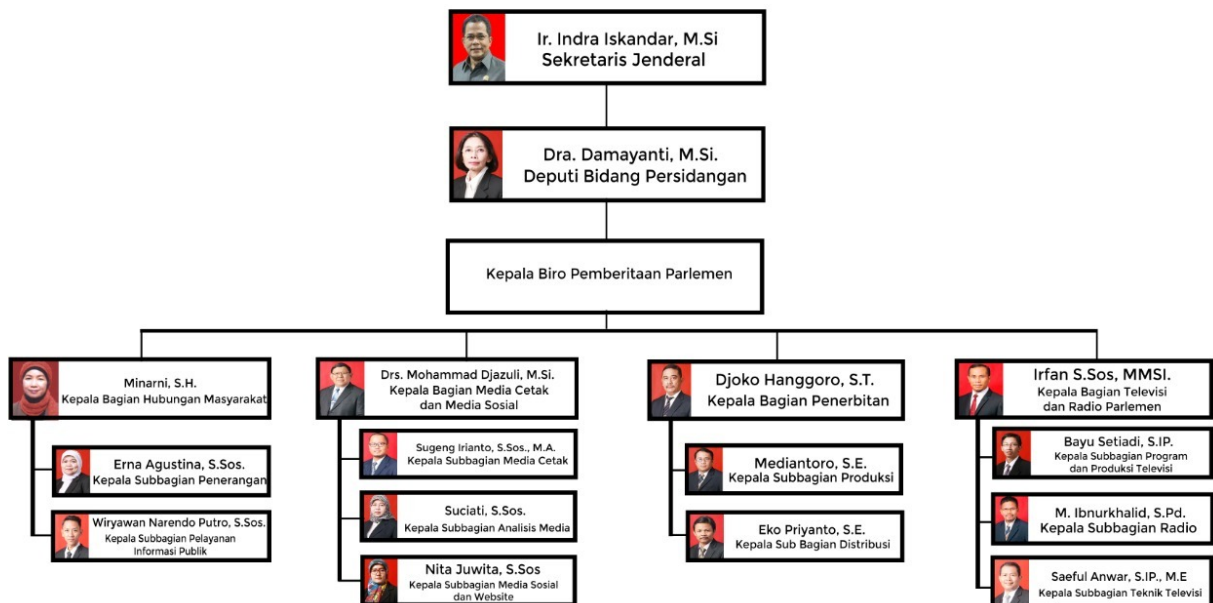
#### 4. Bagian Televisi dan Radio (TVR) Parlemen

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan televisi dan radio. Fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; pengelolaan program dan produksi televisi; dan pengelolaan teknik televisi;

Bagian Televisi dan Radio Parlemen terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Produksi Televisi;
- b. Subbagian Teknik Televisi; dan
- c. Subbagian Radio.

Bagan (1)  
Struktur Organisasi



No.	BAGIAN	PEJABAT STRUKTURAL	PNS		PTT
			JFT	JFU	

1.	Media Cetak dan Media Sosial	4	-	8	35
2.	Humas	3	9	1	6
3.	TV-R Parlemen	4		23	155
4.	Penerbitan	3	-	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>201</b>

Tabel (1) Komposisi Pegawai (per-3 Februari 2021)

### C. Permasalahan

#### 1) Permasalahan/Kendala TVR Parlemen

- a. Siaran TVR Parlemen sampai saat ini belum bisa di akses secara free to air, karena belum memiliki izin siaran baik secara nasional maupun lokal.
- b. TVR parlemen sampai saat ini belum ada kepastian apakah menjadi TV dan radio publik atau tv radio komunitas
- c. TVR Parlemen belum mempunyai akun media sosial sendiri seperti Youtube, Instagram dan facebook yang dapat di gunakan untuk lebih mengencarkan sosialisasi kinerja dewan.
- d. Belum adanya program diklat broadcasting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kru TVR Parlemen

#### 2) Kendala yang dihadapi bagian Penerbitan, Sebagai berikut :

- a. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian professional di bidang penerbitan ( ilustrator, editor dan IT master).
- b. Sarana dan Prasarana memang diakui masih memiliki kekurangan dalam hal peralatan komputer dengan spesifikasi yang menunjang design grafis dan ahli media digital dari penerbitan konvensional menuju e-publihing beserta aplikasi/ software.
- c. Dilihat dari mekanisme kerja dan kebijakan , belum ada pedoman atau peraturan Sekjen DPR RI tentang Pelayanan Penerbitan Satu Pintu (masih dalam bentuk draft/ konsep per Sekjen DPR RI)

#### 3) Pelayanan informasi publik mengalami kendala secara umum dilihat dari sumber munculnya kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kendala Internal
  - 1) Sinergi dengan PPID Pelaksana (Pejabat Eselon III) belum terjalin dengan optimal, sehingga dukungan penyediaan data beberapa kali terkendala;

- 2) PPID Setjen DPR RI, terkendala perijinan untuk *me-release* informasi yang dimiliki oleh badan publik DPR RI, karena izin Alat Kelengkapan Dewan pemilik informasi menjadi bagian penting dalam layanan informasi publik;
- 3) Data Arsip yang dijadikan sumber data untuk layanan informasi publik sesuai ketentuan hanya bersifat pasif, menerima data dari unit kerja yang menyampaikan arsip, sehingga banyak data dan informasi kegiatan di DPR RI telah selesai secara proses namun datanya belum ada di unit Arsip karena belum diserahkan;
- 4) Peraturan DPR perlu direvisi untuk menjangkau kebutuhan pengaturan keterbukaan informasi publik di DPR RI sebagai payung hukum PPID untuk mengelola informasi dan melayani pemohon informasi publik di DPR RI;
- 5) Perlu ada pengaturan ulang aplikasi admin PPID agar mempercepat dan memudahkan admin dalam melayani pemohon informasi publik;
- 6) Tata kelola data dan informasi di PPID Pelaksana, baik secara sarana prasarana, SDM pengelola, maupun mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi belum memadai.

b) Kendala Eksternal

- 1) Sistem pengajuan keberatan secara online yang bertujuan memudahkan pemohon untuk mengajukan keberatan sehingga ada beberapa prosedur yang diluar ketentuan;
  - Tidak *update*-nya dokumen-dokumen PPID;
  - DIP (belum punya);
  - DIK (terakhir penetapan tahun 2018);
- 2) SK Penetapan PPID tidak sejalan dengan perkembangan regulasi yang ada (perlu dibentuk SK Baru menyesuaikan perubahan nomenklatur sejak berlakunya Perpres No.26 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
- 3) SOP yang sudah tidak *compatible* diterapkan mengingat telah terjadi perubahan alur kerja, tata kelola organisasi dan SDM;
- 4) Kurangnya kapasitas SDM, untuk dapat mengimbangi perkembangan dinamika layanan informasi publik yang cepat;

**D. Prestasi**

Prestasi Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2020 dari PR Indonesia Award (PRIA) ; PRIA adalah ajang kompetisi yang mengapresiasi effort kinerja kehumasan/kominfo/publik

relation yang unggul dari korporasi/instansi seluruh Indonesia dan sekaligus mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja PR sepanjang tahun.

Berikut 3 (tiga) anugrah/awards yang berhasil diperoleh oleh Biro Pemberitaan Parlemen::

1. Bronze, katagori Government PR



2. Bronze, katagori Sosial Media Terpopuler



3. The Best Presenter Lembaga, diraih oleh Leidena Sekar Nagari, Pranata Humas Setjen DPR RI.



## Bab II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

## A. Tujuan dan Sasaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pemberitaan Parlemen berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada rencana strategis Deputy Persidangan yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pemberitaan Parlemen berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Deputy Persidangan yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan unit eselon II kepada Deputy Persidangan setiap awal tahun anggaran.

Sebagai salah satu unsur supporting sistem di Sekjen DPR RI dalam hal ini Deputy Persidangan, dibidang keterbukaan informasi, maka indikator spesifik dari rencana kerja biro Pemberitaan Parlemen adalah dalam pengelolaan pelayanan publik, seperti standart pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2020-2024, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberitaan Parlemen, yaitu:

- a. Keterbukaan Informasi dan
- b. Pelayanan berdasarkan SPBE

Tujuan dan Sasaran kinerja Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui platform Media sosial, Media Cetak, TV dan Radio, dan Edukasi Parlemen serta Pelayanan PPID
  - b. Melaksanakan Pelayanan berdasarkan SPBE (sistem pelayanan berbasis elektornik)
2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pemberitaan Parlemen adalah terwujudnya :

- a. dukungan keterbukaan informasi DPR RI, melalui platform media sosial, media cetak, media elektronik, edukasi parlemen, dan PPID.
- b. terwujudnya pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik dibidang pelayanan informasi berbasis SPBE
- c. terwujudnya akuntabilitas.

**B. PERJANJIAN KINERJA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN TAHUN 2020**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Untuk pelaksanaan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen didukung dengan anggaran sebesar **Rp.139.716.970.000,-** (sumber program Keiatan Pemberitaan Parlemen pada Perjanjian Kinerja)

Perjanjian kinerja Biro Pemberitaan Parlemen tergambar dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya dukungan pemberitaan DPR RI	1.	Peringkat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dokumen (PPID)	Menuju Informatif
		2.	Jumlah Pemirsa/penonton terhadap siaran TV Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI	800 juta
		3.	Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website	1 hari
		4.	Presentase Penyerapan Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	90%
2.	Meningkatnya keterikatan public terhadap Media social dan website DPR RI	Jumlah pengikuti viewer/follower/subscriber akun media social DPR RI		655.000 followers

**BAB III**

**PROFIL KINERJA 2019**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pemberitaan Parlemen dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun



2020 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Biro Pemberitaan Parlemen sebesar 83% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

#### A. SASARAN KERJA I

Sasaran Kinerja Pertama (I) yaitu Meningkatnya dukungan pemberitaan DPR RI, terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Peringkat Pelayanan Pengelola Informasi Dokumen (PPID)
2. Jumlah Pemirsa/penonton terhadap siaran TV Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI
3. Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website, dan
4. Presentase Penyerapan Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen.

Berikut diuraikan yaitu:

Sasaran Kinerja	Indikator 1.	Target	Capaian	Nilai
<b>1.1</b>	Peringkat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dokumen (PPID)	Menuju Informasi	Cukup Informatif	79,49

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2020 DPR RI memperoleh katagori “Cukup Informatif” dengan nilai 79,49. Lebih tinggi dari nilai sebelumnya yaitu : 77,30.

Terdapat lima kategori penilaian yaitu:

Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Informatif	90 - 100
2.	Menuju Informatif	80 - 89

3.	Cukup Informatif	60 – 79
4.	Kurang Informatif	40 – 59
5.	Tidak Informatif	< 39

Meskipun keterbukaan informasi publik baru menjadi indikator kinerja Setjen DPR RI pada tahun 2020 ; pada kenyataannya proses keterbukaan informasi telah dimulai sejak DPR RI menetapkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan RUU Usul inisiatif DPR RI, yang selanjutnya DPR RI masuk dalam Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik. Sebagai salah satu badan publik maka tuntutan akuntabilitas dan keterbukaannya menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban.

Dari hasil evaluasi kegiatan implementasi standar teknis layanan informasi publik tahun 2019, tercatat kekurangan pada:

a. **Indikator Pengembangan Website unsur Aksesabilitas Layanan**

Badan Publik belum memiliki aplikasi yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online.

b. **Indikator Pengumuman Informasi Publik**

Profil Badan Publik belum memuat (pengumuman) terkait :

- 1) Lembar berita negara LHKPN Pimpinan Badan Publik tidak diunduh pada laman profil singkat Pimpinan Badan Publik sampai dengan Eselon I
- 2) Badan Publik belum mengumumkan laporan keuangan th 2019 (audited) minimal memuat informasi dan laporan realisasi anggaran neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- 3) Ringkasan Laporan Layanan Informasi melaporkan :
  - Jumlah permohonan informasi yang diterima
  - Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan
  - Jumlah permohonan yang dikabulkan 1) sebagian atau 2) seluruhnya.

Belum menggunakan format e-monev komisi Informasi yang *didownload* di <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/download>

c. **Indikator Pelayanan Informasi Publik**

a. Belum memiliki DIP yang dimutakhirkan di tahun 2020

b. Belum ada laporan kepuasan layanan Badan Publik th 2019

d. **Indikator Penyediaan Informasi Publik**

Laporan Dokumen Tersedia Setiap Saat belum ada :

a. Surat Perjanjian dan dokumen Barjas ; contoh SPK Pengadaan Barjas

b. Renstra Badan Publik (Renstra DPR – Renstra Sekjen)

Dari 45 lembaga yang mengikuti penilaian dengan kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, DPR RI berada di urutan ke-18.

Ada lima aspek layanan informasi publik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari serangkaian bentuk penilaian terhadap layanan PPID Setjen DPR RI yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu aspek-aspek :

1. Pemohon Informasi
2. Permohonan Informasi

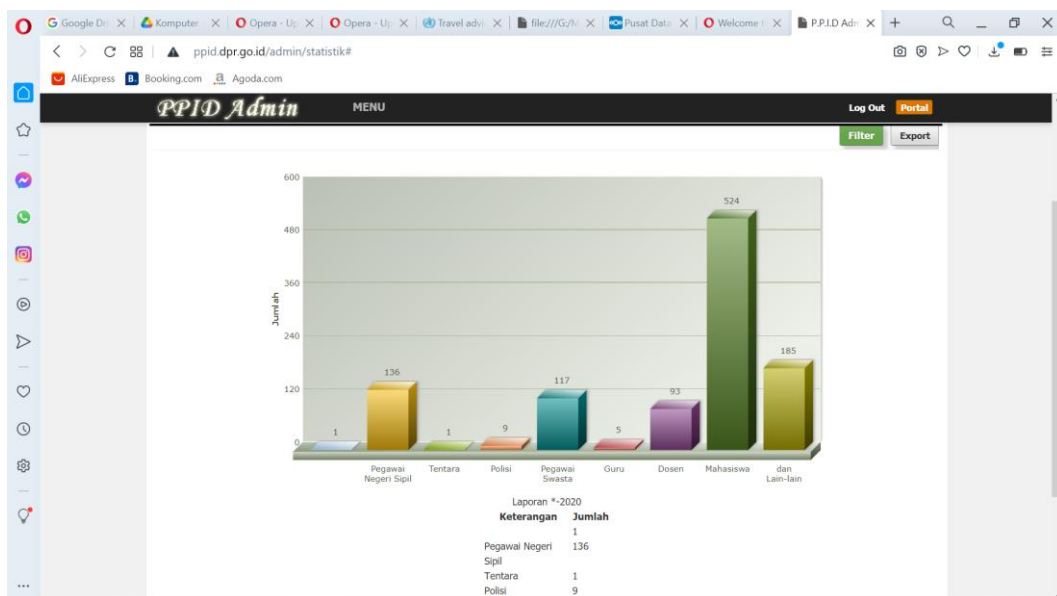
3. Waktu Penyelesaian
4. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya, Dikabulkan Sebagian dan Ditolak
5. Keberatan dan Sengketa

Adapun kinerja PPID terhadap kelima aspek tersebut diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pemohon Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 tercatat pendaftaran akun permohonan baru sejumlah 466 (Empat Ratus Enam Puluh Enam) permohonan yang terdiri dari 456 (Empat Ratus Lima Puluh Enam) pemohon perorangan dan 10 (sepuluh) pemohon badan hukum

Pemohon didominasi oleh mahasiswa dengan total permohonan mencapai 524 (lima ratus dua puluh empat) permohonan. Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga memiliki jumlah yang signifikan 136 (seratus tiga puluh enam). Pemohon dengan background profesi sebagai Dosen berjumlah 93 (Sembilan puluh tiga) permohonan. Selengkapnya dapat dilihat melalui grafik berikut:



### 2. Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi di tahun 2020 sejumlah 1.052 (seribu lima puluh dua) permohonan. Terdapat penurunan dibandingkan pada tahun 2019 berjumlah 2.226 (dua ribu dua ratus dua puluh enam).

**Tabel Pemohon dan Permohonan Data PPID 2019 dan 2020**

TAHUN	PEMOHON	PERMOHONAN
2019	603	2226
2020	466	1052

Penurunan angka permohonan informasi publik ini menjadi indikasi kinerja keterbukaan informasi publik yang disampaikan melalui saluran-saluran publik (website, social media, majalah, bulletin) telah memenuhi kebutuhan publik atas informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI. Antara lain dalam hal website DPR RI melengkapi menu “ARSIP” yang berisi dokumen risalah pembahasan RUU yang telah selesai dan telah menjadi arsip di bagian Arsip dan Museum di Pusat Data dan Informasi. Website DPR RI juga mendesain ulang menu SILEG (system informasi legislasi) yang berisi rekam jejak pembahasan suatu RUU. Situasi pandemi Covid-19 juga mendorong Setjen DPR RI untuk memanfaatkan social media dalam melakukan live streaming melalui youtube dan berbagai akun social media lain terkait rapat-rapat DPR RI.

Berdasarkan jenis data yang diminta disajikan dalam table rekap berikut ini:

**REKAP PERMOHONAN DAN JENIS DATA YANG DIMINTA PEMOHON TAHUN 2019 - 2020**

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN	JENIS PERMINTAAN DATA			
		RISALAH	NASKAH AKADEMIK	LAPORAN SINGKAT	LAIN-LAIN
2020	1052	474	386	34	158
2019	2.226	1.097	666	97	344

**3. Waktu Pemenuhan**

Diagram berikut menggambarkan jumlah permohonan didasarkan pada waktu penyelesaian Permohonan Informasi Publik

**Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik Tahun 2020**

Tahun	Permohonan	Selesai Dalam		
		< 10hr	10hr < n < 17hr	> 17hr
2020	1052	754	169	129

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan tergantung ketersediaan data yang diminta oleh pemohon. Jika data atau informasi yang diminta tersedia di cloud PPID permohonan dapat diselesaikan dengan singkat. Apabila data yang dimohon masih berada dalam penguasaan unit kerja pemilik data maka PPID harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Proses koordinasi dengan unit kerja ini memerlukan waktu sehingga penyelesaian permohonan baru dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Penyelesaian yang membutuhkan waktu lebih dari 17 hari umumnya adalah data/informasi yang masih bersifat aktif dan memerlukan waktu untuk proses pendokumentasian.

Meskipun beberapa permohonan memerlukan waktu yang relative lama, namun petugas layanan yang menjadi penanggung jawab atas permohonan tersebut akan secara aktif menginformasikan perkembangan proses pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID melalui portal layanan yang dimiliki oleh para pemohon. Dengan demikian permohonan informasi dan hubungan dengan

para pemohon informasi berlangsung dengan baik. Umumnya para pemohon informasi yang ingin mengupdate permohonan tanpa membuka portal layanan menanyakan secara langsung dengan memanfaatkan fitur whatsapp “**Tanya Admin**” di website ppid.dpr.go.id

#### 4. **Permohonan dikabulkan Seluruhnya, Dikabulkan Sebagian dan Ditolak**

Dari 1052 (seribu lima puluh dua) permohonan informasi publik, sebanyak 1049 (seribu empat puluh sembilan) permohonan yang diajukan dikabulkan secara keseluruhan. Hanya terdapat 3 (tiga) permohonan yang dibatalkan oleh pemohon informasi.

#### 5. **Keberatan dan Sengketa**

Selama periode Januari sampai Desember 2020, PPID Setjen DPR RI tidak menerima Permohonan Keberatan dari pemohon informasi publik. Sehingga PPID Setjen DPR RI juga tidak mendapat gugatan atas sengketa informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah) maka, PPID Setjen DPR RI juga turut mengevaluasi kinerja petugas dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Memuaskan
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Memuaskan

Tabel 2. Kategori Mutu Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,1. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	PERTANYAAN (UNSUR PELAYANAN)	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Pertanyaan 1 (Kemudahan Mekanisme, Sistem, dan Prosedur)	2,78
2.	Pertanyaan 2 (Kemudahan Persyaratan)	3,6
3.	Pertanyaan 3 (Waktu Penyelesaian)	3,21
4.	Pertanyaan 4 (Kesesuaian Produk yang Diberikan)	3,5
5.	Pertanyaan 5 (Kompetensi Petugas/Kejelasan dalam memberikan pelayanan)	3,6
6.	Pertanyaan 6 (Kompetensi Petugas/Kecepatan dalam memberikan pelayanan)	3,3
7.	Pertanyaan 7 (Perilaku Petugas)	3,67
8.	Pertanyaan 8 (Sarana dan Prasarana/Tampilan Website)	3,5

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan secara keseluruhan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai **85,7**
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Memuaskan**

Selama periode Januari sampai April 2020 PPID Setjen dan BK DPR RI melakukan beberapa kegiatan guna mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI secara optimal. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti *redesign website* ppid.dpr.go.id; evaluasi dan monitoring PPID pelaksana; dan Seminar keterbukaan Informasi Publik di DPR. Adapun rincian pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Januari 2020 dilakukan evaluasi layanan informasi publik, mengingat terjadi penumpukan permohonan informasi publik diakhir tahun 2019, dan ketidakjelasan penanggung jawab dari tiap-tiap permohonan karena saat itu penanggung jawab layanan dijadwalkan setiap minggu secara bergilir diantara SDM layanan informasi. Dari hasil evaluasi disepakati untuk adanya sistem layanan informasi dengan penanggung jawab permohonan secara devinitif oleh satu orang analis dan satu orang *front officer* (FO). Dengan sistem baru ini satu permohonan dari mulai diajukan samapai dengan diselesaikan atau terjadi sengketa informasi terdapat penanggung jawabnya;
2. Tanggal 3 Januari 2020, FGD Pranata Humas Menyusun tools untuk implementasi sistem layanan berbasis PJ permohonan, dengan memanfaatkan software "*spreadsheet*" yang terdapat dalam *cloud.dpr.go.id* untuk proses pendokumentasian pemohon, permohonan dan koordinasi antara FO dan analis dalam memenuhi permohonan informasi publik;

3. Tanggal 5 Januari 2020, Sosialisasi dilanjutkan workshop mekanisme layanan dan pemanfaatan *spreadsheet* serta menyepakati pola rooling PJ permohonan antara FO dan Analis;
4. Tanggal 24 Juli 2020, Rapat Zoom Virtual membahas pembagian PJ pengisian, Form isian mandiri monitoring dan evaluasi KIP;
5. Tanggal 30 Agustus 2020, Rapat pleno sebelum submit form isian mandiri Money KIP Tahun 2020.
6. Tanggal 4 Oktober 2020, Presentasi Inovasi PPID oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dalam rangkaian proses monitoring dan evaluasi PPID yang dilaksanakan oleh KIP;
7. Tanggal 1-3 Desember 2020, Rapat Evaluasi PPID 2020 dan FGD awal program kerja PPID 2021. Kegiatan dihadiri oleh Deputi Bidang Persidangan dan menghasilkan dokumen evaluasi PPID 2020;

#### Sasaran Kinerja 1.2.

Sasaran Kinerja	Indikator 2.	Target	Capaian	%
<b>1.2</b>	Jumlah Pemirsa/penonton terhadap siaran TV Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI	800.000.000	971.689.957	121 %

Jumlah permirsa/penonton tersebut berasal dari beberapa program TV Parlemen yang telah melaksanakan sosialisasi kegiatan DPR RI yaitu :

NO	PROGRAM	MAKSUD & TUJUAN	SIARAN	OUTPUT	OUTCOME
1.	SUARA DAPIL	AGAR PENONTON MEMAHAMI BAGAIMANA KINERJA ANGGOTA DEWAN SAAT TURUN KE DAPIL YANG SELAMA INI TIDAK TERPUBLIKASIKAN OLEH MEDIA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>	MENSOSIALISASIKAN SELURUH KEGIATAN ANGGOTA DEWAN BAIK DI DALAM RUANG SIDANG MAUPUN DI LUAR RUANG SIDANG DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI DPR RI	MASYARAKAT DAPAT MENGENALI WAKIL RAKYAT DAN KINERJANYA MELALUI PROGRAM-PROGRAM TVR PARLEMEN.
2.	PROFIL WAKIL RAKYAT	MELIHAT SISI LAIN ANGGOTA DPR RI DARI ORANG ORANG TERDEKAT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>		

3.	SUARA PARLEMEN	TALKSHOW YANG MENGHADIRKAN NARASUMBER DARI ANGGOTA DPR RI, PENGAMAT MAUPUN PRAKTISI. TEMA YANG DIANGKAT TERKAIT DENGAN ISU-ISU TERKINI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TVR PARLEMEN</li> <li>● FIRST MEDIA</li> <li>● YOUTUBE</li> </ul>		
4.	PEREMPUAN PARLEMEN	UNTUK MENGINSPIRASI PARA PEREMPUAN PEREMPUAN AGAR BERANI TERJUN KE DUNIA POLITIK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TVR PARLEMEN</li> <li>● FIRST MEDIA</li> <li>● YOUTUBE</li> </ul>		
5.	MUTIARA PARLEMEN	SEBUAH PROGRAM TAUSIAH YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN INFORMASI SEPUTAR KAJIAN ISLAMI DAN SIRAMAN ROHANI UNTUK DI PUBLIKASIKAN OLEH MEDIA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TVR PARLEMEN</li> <li>● FIRST MEDIA</li> <li>● YOUTUBE</li> </ul>	MENSOSIALISASIKAN SELURUH KEGIATAN ANGGOTA DEWAN BAIK DI DALAM RUANG SIDANG MAUPUN DI LUAR RUANG SIDANG DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI DPR RI	MASYARAKAT DAPAT MENGENALI WAKIL RAKYAT DAN KINERJANYA MELALUI PROGRAM-PROGRAM TVR PARLEMEN.
6.	PARLEMEN BICARA	PROGRAM YANG BERSIFAT SOFT NEWS YANG MENGGALI LEBIH DALAM PERMASALAHAN ISU NASIONAL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TVR PARLEMEN</li> <li>● FIRST MEDIA</li> <li>● YOUTUBE</li> </ul>		
7.	ALAT KELENGKAPAN DEWAN	MENYEBARLUASKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DARI ALAT KELENGKAPAN DEWAN BESERTA MITRA KERJANYA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TVR PARLEMEN</li> <li>● FIRST MEDIA</li> <li>● YOUTUBE</li> </ul>		
8.	BEDAH RUU	MENGANGKAT ISU ISU TERKINI YANG TERKAIT DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TVR PARLEMEN</li> <li>● FIRST MEDIA</li> <li>● YOUTUBE</li> </ul>		



9.	FORUM LEGISLASI	PROGRAM YANG BERISI ACARA DISKUSI DI RUANG WARTAWAN DPR RI MENGENAI RUU YANG SEDANG DIBAHAS OLEH DPR DAN PEMERINTAH MAUPUN UU YANG TELAH DISAHKAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>	MENSOSIALISASIKAN SELURUH KEGIATAN ANGGOTA DEWAN BAIK DI DALAM RUANG SIDANG MAUPUN DI LUAR RUANG SIDANG DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI DPR RI	MASYARAKAT DAPAT MENGENALI WAKIL RAKYAT DAN KINERJANYA MELALUI PROGRAM-PROGRAM TVR PARLEMEN.
10.	ASPIRASI	PROGRAM TALKSHOW YANG DIMANA MASYARAKAT DAPAT MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MENYAMPAIKAN, MANYALURKAN ASPIRASINYA KEPADA ANGGOTA DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>		
11.	KELAS PARLEMEN	PROGRAM YANG BERISI TAYANGAN MENSOSIALISASIKAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DI DAERAH PEMILIHAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>		
12.	WARTA PARLEMENTARIA	TAYANGAN BERITA YANG BERSIFAT HARD NEWS DENGAN DURASI SELAMA 2 MENIT, YANG DI TAYANGKAN DI TVR PARLEMEN DAN TV NASIONAL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>	MENSOSIALISASIKAN SELURUH KEGIATAN ANGGOTA DEWAN BAIK DI DALAM RUANG SIDANG MAUPUN DI LUAR RUANG SIDANG DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI DPR RI	MASYARAKAT DAPAT MENGENALI WAKIL RAKYAT DAN KINERJANYA MELALUI PROGRAM-PROGRAM TVR PARLEMEN.
13.	ENGLISH PARLIAMENTARY NEWS	PROGRAM YANG BERISI KUMPULAN BERITA PILIHAN YANG DISAMPAIKAN DALAM BAHASA INGGRIS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>		
14.	DIALEKTIKA DEMOKRASI	PROGRAM YANG BEISI ACARA DISKUSI DI RUANG WARTAWAN DPR RI MENGENAI ISU-ISU TERKINI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>		
15.	WARTA PARLEMEN	TAYANGAN BERITA YANG BERSIFAT HARD NEWS DENGAN DURASI SELAMA 2 MENIT, YANG DI TAYANGKAN DI TVR PARLEMEN DAN TV NASIONAL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TVR PARLEMEN</li> <li>• FIRST MEDIA</li> <li>• YOUTUBE</li> </ul>		

--	--	--	--	--	--

Disamping itu TVR juga bekerja sama dengan Kompas TV dan TV One dengan menangkat program warta Paelemen berdurasi 2 (dua) menit dengan rincian program

1. Program Warta Parlemen di Kompas TV sebagai berikut :

<b>PROGRAM</b>
SAPA INDONESIA PAGI
KOMPAS SIANG
SAPA INDONESIA SIANG
KOMPAS PETANG
KOMPAS MALAM

Program Warta parlemen di Kompas TV dalam satu hari mencapai 5 (lima) berita.

2. Program Warta Parmen di TV One yaitu "KABAR PAGI" dengan menampilkan 1 (satu) berita setiap hari.

Tabel dibawah ini menunjukkan Data Penonton dari masing-masing program :

**DATA PENONTON PROGRAM FILLER,INFOGRAFIS DAN RADIO BAGIAN TVR PARLEMEN**

<b>NO</b>	<b>MEDIA</b>	<b>VIEWER</b>
1	YOUTUBE	1.019.672
2	BERITA SATU	712.848
3	KOMPAS	8.705.868
4	TV ONE	7.037.321
5	CNN	22.824.991
6	METRO TV	5.664.876
7	SCTV	17.590.369
8	INEWS TV	631.446
9	NET TV	11.856.933
10	ANTV	47.767.414
11	RCTI	18.120.779
12	MNC TV	247.395
13	GTV	707.238
14	TRANS 7	8.999.395
15	TVRI	762.277.000
16	RADIO SINDO TRIJAYA	9.590.000
17	RADIO ELSHINTA	6.696.000
18	RADIO KBR 68	9.953.007
19	VIDEOTRON BLORA	2.168.490
20	VIDEOTRON SENEN	7.850.115
21	VIDEOTRON PUSAT SEJARAH	21.268.800

<b>TOTAL</b>	<b>971.689.957</b>
--------------	--------------------

### Sasaran Kinerja 1.3.

Sasaran Kinerja	Indikator 3.	Target	Capaian	%
<b>1.3</b>	Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website	1 hari (24 Jam)	4,6 jam	522%

Tingkat kecepatan penayangan berita di website berdasarkan proses peliputan yang dilaksanakan, mengingat peliputan dilaksanakan di lingkungan Gedung DPR RI, di luar Gedung DPR RI tetapi masih di wilayah DKI, peliputan pada saat kunjungan kerja spesifik dan reses serta peliputan kegiatan saat kunjungan kerja lapangan (DKI Jakarta). Proses waktu yang dibutuhkan mulai dari peliputan sehingga menjadi berita dan tayang di website berbeda-beda, sebagaimana ditampilkan dalam tabel kinerja peliputan dibawah ini.

**Tabel .... Kinerja Peliputan Reporter**

No	Jenis Liputan	Waktu
<b>1</b>	Peliputan kegiatan Dewan dan Kesetjenan di Lingkungan Gedung DPR RI	± 3 jam
<b>2</b>	Peliputan kegiatan Dewan dan Kesetjenan di luar Gedung DPR RI (DKI Jakarta)	± 4 jam
<b>3</b>	Peliputan kegiatan Dewan saat Kunjungan Kerja Spesifik	± 6 jam
<b>4</b>	Peliputan kegiatan Dewan saat Kunjungan Kerja Reses	± 6 jam
<b>5</b>	Peliputan kegiatan Dewan saat Kunjungan Kerja Lapangan (DKI Jakarta)	± 4 jam

Target tingkat kecepatan penayangan berita di Website adalah 1 hari atau dalam hitungan jam adalah 24 jam. Capaian kecepatan penayangan berita yang dihasilkan dari kinerja reporter yang berbeda-beda tersebut disepakati bahwa angka capaian adalah angka rata-rata dari hasil kinerja reporter tersebut sehingga tercapai angka 4,6 jam. Angka ini menjadikan capaian lebih cepat dari target 522%. Percepatan waktu yang dihasilkan tidak terlepas dari peran teknologi informasi dan teknologi broadcasting yang telah dikuasai oleh tim editing di Setjen DPR RI, yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sasaran Kinerja 1.4.

Sasaran Kinerja	Indikator 4.	Target	Capaian	%
<b>1.4</b>	Presentase Penyerapan Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	90%	94,88%	105%

*Pagu Anggaran yang dikelola Biro Pemberitaan Parlemen setelah efisiensi adalah sebesar Rp. 129.285.480.000,- Dari rencana tersebut terealisasi sebesar Rp. 122.661.335.618,00 atau 94,88%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:*

No.	SATKER	PAGU	REALIASI	%	Keterangan
		Rp	Rp		
1.	<b>Biro Pemberitaan Parlemen</b>	<b>27.035.968.000,-</b>	<b>25.907.678.673,-</b>	95,83%	<p><i>Realisasi Anggaran tersebut untuk kegiatan :</i></p> <p>a. Kegiatan penggajian PPNASN bulan April – Juni 2020 dan rapat rapat Koordinasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen</p> <p>b. Kegiatan Strategi Komunikasi Telah dilaksanakan Tender dan Telah ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2020 meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Nasional DPR RI (</li> <li>- Monitoring Isu Publik Berbasis Big Data</li> <li>- Strategi Branding dan Komunikasi Publik DPR RI</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Media Mainstream</li> <li>- Manajemen Konten Media Sosial</li> <li>- Manajemen Aktivitas Branding</li> <li>- Kegiatan Manajemen Aplikasi Mobile DPR RI</li> </ul>
2.	<b>Bagian Media Cetak dan Media Sosial</b>	<b>24.328.978.000,-</b>	<b>21.430.816.725,-</b>	88,09%	<p><i>Realisasi Anggaran tersebut untuk kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Penayangan Advertorial di media cetak</li> <li>b. Kegiatan Penayangan Media Online sebanyak</li> <li>c. Rapat rapat terkait dengan, penyusunan materi majalah dan buletin Parlementaria</li> <li>d. Analisis Media</li> <li>e. Peliputan kegiatan kegiatan Pimpinan, komisi dan AKD DPR RI</li> <li>f. Kegiatan Diskusi Forum Legislasi dan Dialektika Demokrasi (Selasa dan Kamis)</li> <li>g. Kegiatan Live Sreaming Rapat Paripurna DPR RI dan Seluruh Rapat DPR RI yang terbuka di Media Sosial DPR RI</li> </ul> <p style="text-align: right;">- antara lain : Facebook,</p>

					Instagram, Youtube, Periscope, dan Website DPR RI
3.	<b>Bagian Humas</b>	<b>5.028.531.000,-</b>	<b>4.249.824.800,-</b>	84,51%	<i>Kegiatan tersebut untuk kegiatan :</i> a. Kunjungan Edukasi Online b. Live Instagram Social Media Humas (@edukasiparlemen, @ppid.dpri, @parlemenremaja) c. Kegiatan Parlemen Kampus di Cirebon d. Kegiatan Pameran Legislatif Sulut Go e. Kegiatan Parlemen Remaja
4.	<b>Bagian Televisi dan Radio Parlemen</b>	<b>51.708.316.000</b>	<b>50.698.250.220,-</b>	98,05%	<i>Realisasi anggaran untuk kegiatan antara lain :</i> a. Penayangan Filler di Stasiun TV Swasta dan Nasional dan Antara b. Penayangan Infografis DPR RI di Media Luar Ruang c. Dialog Interaktif di Radio Swasta dan Nasional d. Penayangan Public Service Announcement (PSA) pimpinan DPR, Pimpinan/ Anggota BURT, dan Anggota DPR RI dan Siaran Langsung Sidang Paripurna DPR RI e. Kegiatan Program Suara

					<p>Dapil dan Kelas Parlemen</p> <p>f. Honor Narasumber Program dalam acara Program TVR Parlemen (Suara Parlemen Pagi dan Sore, Wanita Parlemen, Bedah RUU, Profil Anggota dan lainnya).</p> <p>g. Kegiatan FGD/Lokakarya Radio Parlemen dengan radio lokal bersama Anggota DPR RI</p> <p>h. Perbaikan dan Sewa alat Bagian TVR Parlemen dalam menunjang siaran</p>
5.	<b>Bagian Penerbitan</b>	<b>21.183.687.000</b>	<b>20.374.765.200</b> ,-	96,18%	<p><i>Realisasi anggaran untuk kegiatan antara lain :</i></p> <p>a. Pencetakan Majalah dan Buletin Parlementaria DPR RI;</p> <p>b. Pendistribusian dan Praposting Buletin Parlementaria DPR RI ke Dalam Negeri;</p> <p>c. Pendistribusian dan Praposting Buletin Parlementaria DPR RI Ke Luar Negeri</p> <p>d. Pendistribusian dan Praposting Majalah Parlementaria DPR RI ke Dalam Negeri;</p> <p>e. Pendistribusian dan Praposting Majalah Parlementaria</p>

					<p>DPR RI ke Luar Negeri;</p> <p>f. Pendistribusian Buletin dan Majalah Parlementaria DPR RI ke Bandara, Stasiun KA, Pelabuhan, Damri, Pelni dan Rumah sakit;</p> <p>g. Pencetakan Leaflet Armus dan Leaflet BKSAP;</p> <p>h. Pelaksanaan Rapat Koordinasi pembuatan Dummy Majalah dan Buletin Parlementaria;</p> <p>i. Kegiatan Konsinyering terkait Pencetakan dan Distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria</p> <p>j. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi dan Praposting ke Luar Negeri;</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria;</li> <li>3. Honor narasumber dan transport local.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--

Tabel (9) Kinerja Keuangan Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2020

## B. SASARAN KERJA II

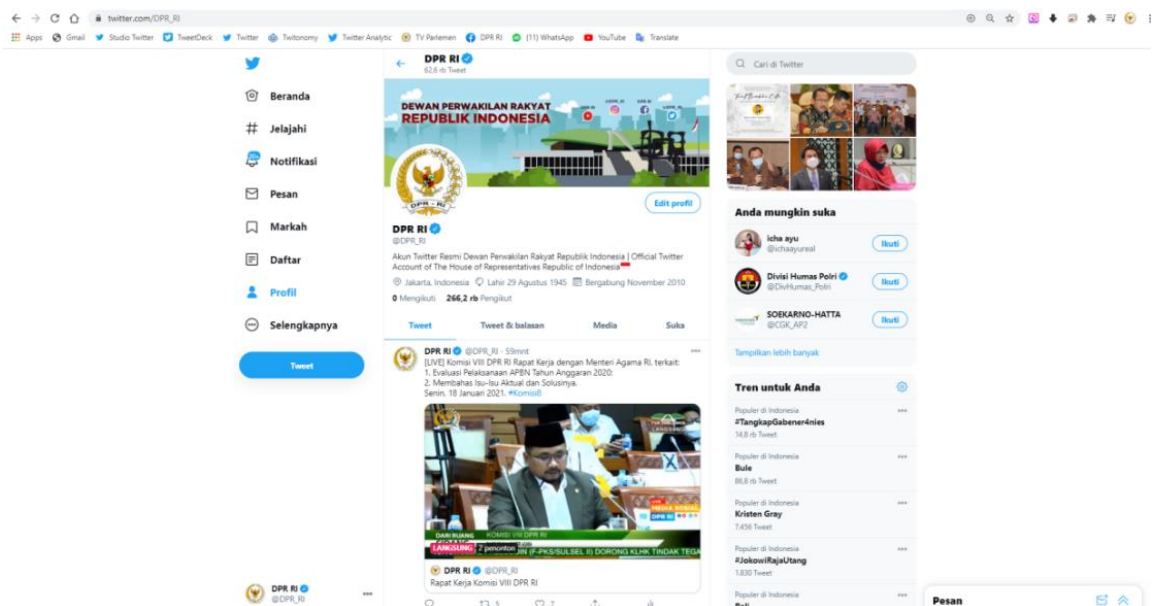
Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Capaian	%
2 Meningkatnya keterikatan public terhadap Media social dan website DPR RI	Jumlah pengikut viewer/follower/subscriber akun media social DPR RI	655.000 follower	1.555.814 follower/viewer/subscriber	238%

Jumlah pengikut/viewer/follower/subscriber akun media social DPR RI menjadi indikator kinerja meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI. Media sosial DPR RI yang dikelola adalah :

1. Twitter
2. Instagram
3. Facebook dan
4. Youtube

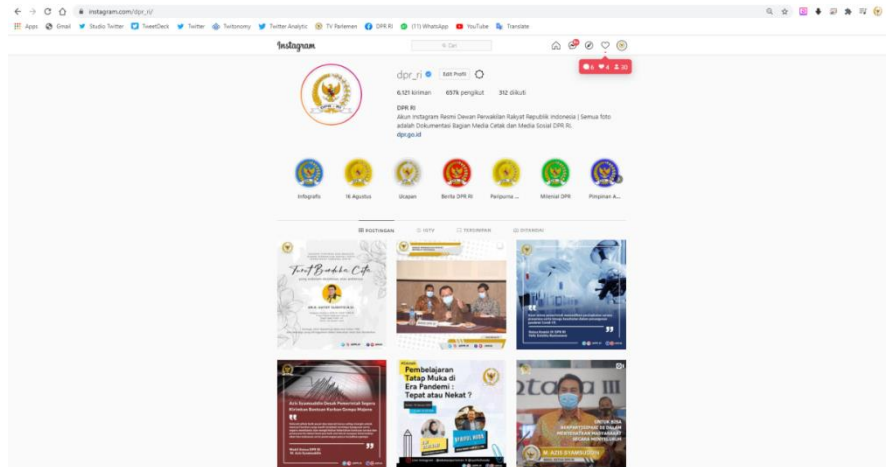
Berikut screenshot masing-masing media sosial :

### a) Twitter @DPR\_RI



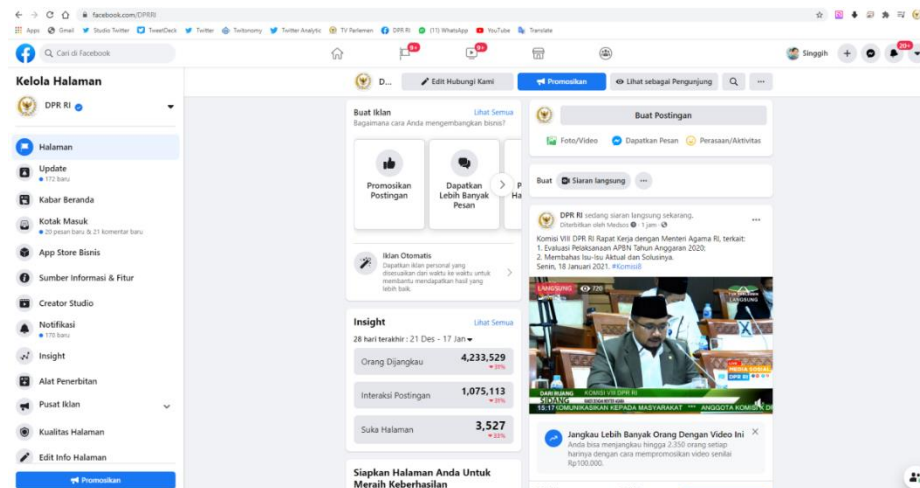
Twitter DPR RI di dibuat 26 Februari 2014 dan per tanggal 15 Januari 2021 saat ini Twitter memiliki 265.158 followers.

## b) Instagram@DPR\_RI



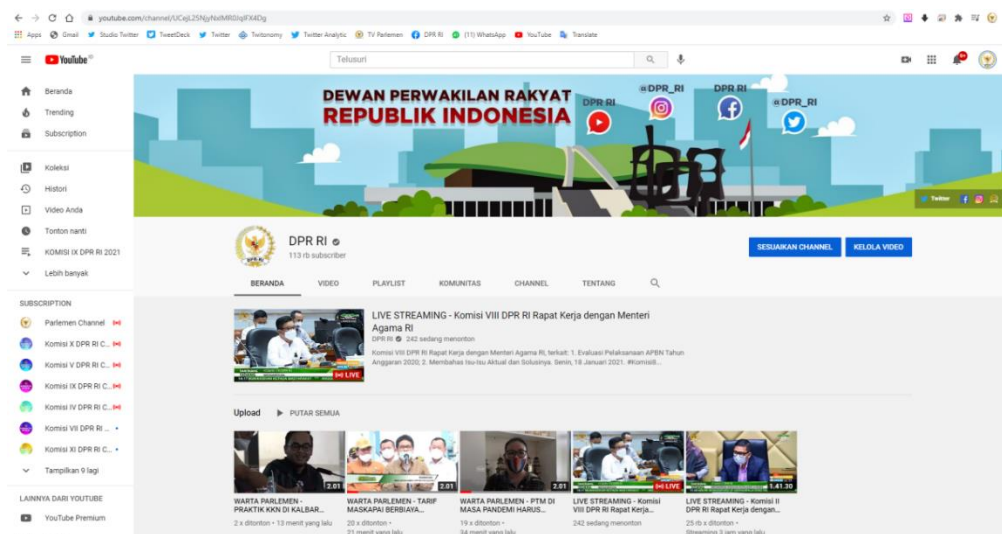
Instagram DPR RI di buat 1 Januari 2016 dan per tanggal 15 Januari 2021 saat ini Instagram memiliki 656.017 followers, 6.117 kiriman/postingan dan 312 following. Jumlah postingan Instagram lebih sedikit karena karakteristik Instagram tidak membutuhkan banyak postingan namun setiap postingan harus melihat momentnya.

## c) Facebook DPR RI



Facebook DPR RI dibuat 12 Desember 2014 dan per tanggal 15 Januari 2021 saat ini Facebook memiliki 290.424 like, 523.639 orang mengikuti. Fanpage Facebook DPR RI melakukan siaran langsung rapat-rapat dan kegiatan DPR RI yang telah ditentukan, seperti siaran Paripurna DPR RI dan Rapat-Rapat AKD yang disiarkan langsung secara kontinyu.

#### d) Youtube DPR RI



Youtube DPR RI dibuat 12 Desember 2014 dan per tanggal 15 Januari 2021 saat ini Youtube memiliki 111.000 subscribe dan 17.6086 ribu Video.

Jumlah pengikut/viewer/follower/subscriber akun media social DPR RI dari keempat flatform tersebut pada tahun 2020 mencapai 1.555.814. Angka ini terhitung 238% dari sasaran target kinerja tahun 2020.

Tercapainya angka 238% dari sasaran target tidak terlepas dari upaya Biro Pemberitaan untuk terus memantau dan mengikuti pergerakan berita dengan pembentukan Tim Agenda Setting.

##### 1) Agenda Setting

- Dasar:
  - Pemberitaan DPR di Media Cetak dan Media Online
  - Tendensi Pemberitaan DPR di media cetak dan media online
  - Faktor Eksternal: hot isu di media cetak, media online, media sosial, dan editorial media cetak
- Manajemen issue:
  - Prediksi issue yang akan diangkat media: potensi isu yang masih berlanjut dan potensi isu baru
  - Rekomendasi
- Menetapkan Isu sepekan bagi media internal DPR (Media Cetak, Media Sosial, Website, TV Parlemen, dan Radio Parlemen, dan Media Edukasi Humas DPR)

- Dilaksanakan setiap Jumat, dihadiri Kabag dan Kasub Medtaksos, Kabag dan Kasub TVRadio Parlemen, Redaktur Medtaksos, dan Redaktur TV Radio Parlemen
- Seluruh kegiatan DPR RI dapat diakses di :
  1. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
  2. [www.dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen](http://www.dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen)
  3. [www.dpr.go.id/serba-serbi/radio-parlemen](http://www.dpr.go.id/serba-serbi/radio-parlemen)
  4. <http://streaming.dpr.go.id/>
  5. Aplikasi Handphone *DPR NOW*
  6. Facebook DPR RI
  7. Twitter DPR RI
  8. Youtube DPR RI
  9. Periscope DPR RI

### C. Rekomendasi dan rencana kerja kedepan

Berlandaskan hasil evaluasi terhadap kinerja PPID dari kendala yang ada dan prediksi kebutuhan atas keterbukaan informasi publik di tahun 2021 maka selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan-nya maka disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sinergi dengan PPID Pelaksana antara lain dapat dilaksanakan sebagai berikut:
  - Membuat dan mengaktifkan group whatsapp petugas layanan informasi publik sampai dengan PPID Pelaksana (unit eselon III);
  - Rapat koordinasi rutin untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - Pendampingan pengelolaan informasi publik kepada PPID Pelaksana agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dukungan IT dan merumuskan konsep perubahan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan unit kerja pengelola IT (Bidang Data dan Teknologi Informasi) untuk segera dilakukan perubahan sesuai konsep yang dibuat;
- c. Melakukan updeting berbagai dokumen kelengkapan PPID antara lain (DIP, DIK, SK, SOP dan peraturan lain terkait keterbukaan informasi publik);
- d. Mengikutsertakan seminar, workshop, pelatihan maupun kegiatan studi banding ke badan publik yang memiliki akselerasi dalam peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik.

Langkah strategis Bagian Humas untuk tetap menjalin kedekatan dengan masyarakat yaitu :

1. Menjalankan program-program melalui Daring dan Hybrid untuk pertemuan-pertemuan
2. Melakukan kunjungan dengan menetapkan protokol kesehatan
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik berbasis online dengan menyusun aplikasi yang terintegrasi
4. Melakukan inovasi dalam kegiatan edukasi parlemen dan pelayanan informasi publik melalui aplikasi yang berbasis online, misalnya edutalk di liver instagram@edukasiparlemen dan @ppid.dprri dan webinar tematik.

## **Bab IV**

### **PENUTUP**

Laporan Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2020 disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akuntabel, akurat dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas dan manfaat bagi DPR RI maupun Setjen DPR RI. Diharapkan laporan ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk pengambilan keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan dukungan di bidang pengelolaan Hubungan Masyarakat, Media Cetak dan Media Sosial, Televisi dan Radio Parlemen dan Penerbitan.

Semua kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kinerja akan menjadi fokus perbaikan di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani.

**Jakarta, 3 Februari 2021**  
**Plt. Biro Pemberitaan Parlemen,**

**Moh. Djazuli, S.IP., M.Si.**